

KEPENTINGAN HUNGARIA DALAM MENOLAK PENGIRIMAN BANTUAN MILITER DAN EKONOMI TERHADAP UKRAINA TAHUN 2022 - 2024

Anugrah Agung W.A.¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

The Russia-Ukraine war that has been going on since 2022 has been going on for quite a long time with its impact spreading to the surrounding regions, so that several countries and parties have begun to respond to this condition. The European Union and NATO are some of the parties that have responded to this conflict by imposing sanctions on Russia and sending military and economic aid to Ukraine, but not all member countries of the alliance agree with this policy. Hungary is one of the countries that strongly rejects sanctions against Russia and the provision of military and economic aid to Ukraine, which Hungary sees as only worsening the conflict. This study aims to analyze the national interests of Hungary so that it rejects military and economic aid issued by NATO and the European Union. This study uses a qualitative-descriptive research method with library method data collection, the main approach used is neorealism supported by the concept of national interest. The results of this study indicate that the national interests of Hungary are related to its harmonious relationship with Russia and their dependence on the economy and energy since the past.

Keywords: Military and Economic Assistance, Alliance, National Interest, Energy Security

ABSTRAK

Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak tahun 2022 telah berlangsung cukup lama dengan dampaknya yang meluas ke kawasan di sekitarnya, sehingga beberapa negara dan pihak mulai menanggapi kondisi tersebut. Uni Eropa dan NATO menjadi beberapa pihak yang menanggapi konflik ini dengan pemberian sanksi terhadap Rusia dan pengiriman bantuan militer dan ekonomi kepada Ukraina, namun tidak semua negara anggota aliansi tersebut setuju atas kebijakan tersebut. Hungaria menjadi salah satu negara yang menolak keras sanksi terhadap Rusia dan pemberian bantuan militer maupun ekonomi kepada Ukraina, yang mana Hungaria melihat ini hanya akan memperburuk kondisi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional yang dimiliki oleh Hungaria sehingga menolak bantuan militer dan ekonomi yang dikeluarkan oleh NATO dan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data metode kepustakaan, pendekatan utama yang digunakan adalah neorealisme dengan dukungan konsep kepentingan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional yang dimiliki oleh Hungaria berkaitan dengan hubungan harmonisnya dengan Rusia dan adanya ketergantungan mereka dalam bidang ekonomi dan energi sejak masa lalu.

Kata Kunci: Bantuan Militer dan Ekonomi, Aliansi, Kepentingan Nasional, Keamanan Energi

PENDAHULUAN

Hubungan antar negara-negara yang kompleks selalu mengalami berbagai perkembangan dalam studi hubungan internasional yang mana dalam kondisi ini studi hubungan internasional mendalami berbagai hubungan antar negara yang aktif dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, bahkan pertahanan dan keamanan yang menjadi

salah satu elemen paling penting bagi suatu negara untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Pada keadaan ini tentu saja dapat terjadi berbagai bentuk hubungan antar negara yang terjalin secara internasional yang menunjukkan adanya masing-masing kepentingan dari negara yang saling berhubungan tersebut, yang mana hubungan tersebut seringkali terjadi secara dinamis dengan segala peristiwa dan fenomena yang ada di dalamnya sehingga sangat menarik untuk dibahas secara lebih lanjut.

Pada kepentingan-kepentingan tersebut setiap negara di dunia akan memiliki dorongannya tersendiri untuk secara aktif berperan dan melakukan tindakan dalam sistem internasional, yang mana dalam keadaan ini dapat menentukan keuntungan atau kepentingan apa yang mereka coba raih melalui hubungan yang kompleks dengan satu atau lebih negara lainnya di dunia. Pada keadaan ini banyak kondisi hubungan antar negara yang pada akhirnya memang didasari oleh suatu kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat, bahkan tidak terkecuali dalam kondisi konflik atau perang sekalipun terdapat kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara sehingga akhirnya memilih untuk terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pada perkembangan ini kita mengenal adanya berbagai gesekan dalam kepentingan yang tidak jarang berakhir menjadi konflik bahkan lebih besar menjadi sebuah kontak senjata atau yang dikenal dengan perang.

Pada akhirnya studi hubungan internasional juga membahas mengenai perkembangan konflik antar negara untuk melihat sumber permasalahan apa yang mendasari kondisi tersebut, hingga akhirnya dapat ditemukan suatu solusi pasti yang dapat meredakan kondisi tersebut atau sekadar melakukan penelitian yang dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap suatu konflik atau perang antar negara. Konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina merupakan salah satu bentuk hubungan tidak harmonis yang terjadi di antara dua negara, namun pada akhirnya ini berkembang dan menjelma menjadi sebuah permasalahan yang sangat kompleks ketika akhirnya dampak yang diakibatkan dari perang tersebut meluas bahkan kepada pihak yang tidak terlibat sama sekali di dalamnya.

Perang di antara Rusia dan Ukraina merupakan salah satu kondisi yang cukup klasik dan telah menonjol sejak awal perpecahan Uni Soviet, yang mana sebelumnya Rusia dan Ukraina merupakan satu bagian dari Uni Soviet sebelum akhirnya terpecah belah pasca era Perang Dingin. Salah satu bentuk invasi yang kita pahami dari konflik tersebut adalah aneksasi yang dilakukan oleh Rusia ke wilayah Krimea pada tahun 2014, yang mana itu menjadi bentuk invasi yang cukup besar sehingga berdampak pada dunia internasional. Pada tanggal 24 Februari 2022 Rusia kembali mengerahkan pasukannya ke Ukraina yang menandakan kembalinya era perang antar negara yang belum pernah terjadi kembali di Eropa sejak tahun 1945, sehingga perang antara Rusia dan Ukraina memiliki implikasi yang sangat serius bagi pasar global yang berpotensi menghasilkan dampak yang berjenjang pada ketahanan ekonomi di seluruh dunia. Rusia dan Ukraina merupakan aktor penting pada pasar minyak, gas, gandum, energi, makanan, dan pupuk global (Burhan Hakim & Moh. Sadiyin, 2022). Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengguncang politik global dan pasar internasional sehingga krisis global ini membawa tantangan baru ke dalam hubungan internasional. Hal ini tentu akan menghasilkan dampak jangka panjang pada ekonomi di seluruh dunia. Invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina menjadi peristiwa global yang memiliki implikasi besar terhadap seluruh negara.

Perang yang terjadi pada awal tahun 2022 tersebut nampaknya belum berakhir hingga saat ini, sehingga banyak pihak-pihak di dunia yang merasa memiliki caranya sendiri untuk dapat menghentikan konflik terkait. Kondisi ini berkaitan dengan dampak dari peran tersebut

yang mulai meluas hingga ke negara-negara di kawasan lainnya, salah satu pihak yang paling merasakan dampak dari perang ini adalah negara-negara di Eropa yang sebelumnya memiliki beberapa ketergantungan komoditas yang terganggu karena konflik terkait. Ketergantungan mereka terhadap komoditas energi terhadap Rusia dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap keraguan sikap mereka kepada Rusia atas berbagai invasi yang dilakukan kepada Ukraina. Pada bulan Juni tahun 2022 Uni Eropa memulai sanksi kepada Rusia dengan memotong impor minyak mereka, yang mana saat itu Hungaria telah mulai untuk menolak pemberian sanksi tersebut namun mulai luluh setelah perdebatan yang panjang dan diberikan keistimewaan oleh Uni Eropa (CNBC Indonesia, 2022).

Perkembangan intervensi yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam konflik Rusia-Ukraina ternyata tidak berhenti hanya dalam pemberian sanksi saja, dikarenakan pada akhirnya Uni Eropa memberikan sejumlah bantuan kepada Ukraina seperti pemberian bantuan kemanusiaan sebesar 50 juta Euro untuk mengurangi dampak dari konflik yang terjadi. Pada kondisi ini Uni Eropa juga memberikan tambahan bantuan sebesar 500 juta euro dari bantuan sebelumnya, yang mana pada paket bantuan ini ditambahkan berbagai alat dan *platform* militer berat lainnya yang diberikan kepada Ukraina melalui mekanisme *European Peace Facility*. Pemberian sanksi dan bantuan militer maupun ekonomi Uni Eropa kepada Ukraina ini yang pada akhirnya memicor berbagai negara untuk angkat suara akan hal tersebut, salah satunya adalah Hungaria yang menjadi salah satu negara NATO dan Uni Eropa yang sangat mengecam pola bantuan tersebut.

Pada awal periode pemberian bantuan militer oleh NATO pada bulan Maret tahun 2023, Hungaria menolak pengiriman bantuan senjata kepada Ukraina sebagai upaya untuk mencegah mereka masuk dalam kondisi perang dengan Ukraina. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban bahkan menandatangani putusan yang melarang pasokan senjata tersebut, Hungaria berpendapat bahwa justru pengiriman bantuan kepada Ukraina akan memperpanjang konflik yang terjadi sehingga hanya akan menyebabkan konflik kian memanas. Keputusan mereka cukup konsisten hingga pada tahun 2024 di mana Hungaria dengan tegas menolak pengiriman bantuan militer ke Ukraina dengan NATO yang terus melakukan intervensi di dalam konflik tersebut, Hungaria menilai bahwa bantuan militer yang diberikan hanya akan berdampak pada eskalasi konflik yang justru akan menyebabkan kedua pihak semakin merugi dengan terbuangnya semua sumber daya ekonomi dan militer yang digunakan (Khaira Riswan, 2024).

Pada akhirnya menjadi sesuatu yang cukup menarik melihat adanya sikap Hungaria yang menolak secara keras bantuan militer dan ekonomi kepada Ukraina, yang mana sejatinya Hungaria sendiri masih berada pada aliansi dan kelompok yang sama dengan NATO maupun Uni Eropa. Pada kondisi ini menjadi cukup menarik untuk melihat adanya kepentingan yang mendorong kebijakan Hungaria untuk mempertahankan konsistensi mereka terhadap kondisi perang yang ada, di sisi lain Hungaria tetap mempertahankan hubungan baiknya dengan Rusia.

KERANGKA ANALITIK

Penelitian ini menggunakan pendekatan neo-realisme sebagai kerangka analitik utama untuk memahami posisi Hungaria dalam menolak kebijakan bantuan militer dan ekonomi Uni Eropa terhadap Ukraina. Neo-realisme memandang sistem internasional sebagai struktur anarki tanpa otoritas pusat yang dapat memaksa kehendak terhadap negara-negara, sehingga setiap negara didorong untuk mengedepankan prinsip self-help demi kelangsungan hidupnya. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen

untuk mencapai kepentingan nasional tertentu, terutama dalam aspek pertahanan dan keamanan negara.

Kebijakan luar negeri dalam perspektif ini merupakan manifestasi dari upaya negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui hubungan dengan negara lain dalam sistem internasional yang anarki. Sebagaimana dijelaskan Holsti, kebijakan luar negeri merupakan rumusan ide dan gagasan yang bertujuan memecahkan permasalahan atau melakukan perubahan dalam suatu wilayah berdasarkan nilai, unsur waktu, jenis tuntutan tujuan, dan kapabilitas nasional. Dalam kasus Hungaria, penolakan terhadap kebijakan Uni Eropa dapat dipahami sebagai bentuk rasionalitas negara yang memprioritaskan kepentingan nasionalnya dibandingkan kepentingan kolektif organisasi regional.

Kepentingan nasional, menurut Morgenthau, merupakan kemampuan minimum negara dalam melindungi identitas politik, militer, dan kebudayaannya dari ancaman eksternal. Nuechterlein lebih lanjut mengklasifikasikan kepentingan nasional ke dalam empat aspek: pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi. Posisi geografis Hungaria yang berbatasan langsung dengan Ukraina dan ketergantungannya pada energi Rusia menciptakan dilema keamanan yang kompleks, di mana dukungan penuh terhadap Ukraina berpotensi mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasionalnya.

Fenomena aliansi dalam konteks NATO dan Uni Eropa menambah kompleksitas analisis ini. Meskipun Hungaria terikat dalam aliansi strategis dengan negara-negara Barat, sistem internasional yang anarki memungkinkan negara untuk memprioritaskan kepentingan nasionalnya ketika terjadi konflik kepentingan. Aliansi, sebagai instrumen kebijakan keamanan nasional, tidak selalu mengharuskan negara anggota untuk mengorbankan kepentingan vitalnya demi solidaritas kolektif. Dalam hal ini, perilaku Hungaria mencerminkan kalkulasi rasional dalam menghadapi dilema keamanan antara loyalitas aliansi dan kepentingan nasional yang mendesak.

Kerangka analitik ini memungkinkan pemahaman bahwa penolakan Hungaria terhadap bantuan Uni Eropa untuk Ukraina bukan semata-mata sikap yang kontraproduktif, melainkan strategi rasional dalam sistem internasional yang anarki, di mana setiap negara harus memastikan kelangsungan hidupnya melalui perhitungan kepentingan nasional yang cermat, terutama dalam aspek keamanan energi, stabilitas ekonomi, dan pertahanan wilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif analisis untuk mengkaji kepentingan nasional Hungaria dalam menolak kebijakan bantuan militer dan ekonomi Uni Eropa terhadap Ukraina. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian berada pada fenomena sosial politik yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap sudut pandang, aktivitas, perspektif, motivasi, dan interaksi sosial yang terjadi dalam konteks hubungan internasional. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis, mengobservasi, dan memahami secara deskriptif kejadian-kejadian yang terjadi dengan penekanan pada tingkah laku negara sebagai aktor internasional beserta faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut.

Tipe deskriptif analitis digunakan untuk memberikan interpretasi yang baik terkait kondisi, fenomena, dan peristiwa yang tengah terjadi melalui catatan, analisis, dan

penggambaran yang sistematis. Pendekatan ini bertujuan memperoleh informasi dan data secara aktual dan faktual tentang posisi Hungaria, kemudian melakukan proses analisis pada aspek-aspek yang terlibat dalam kasus tanpa melakukan pengujian hipotesis, namun memberikan interpretasi apa adanya tentang fenomena yang dipengaruhi faktor-faktor terkait. Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif fenomena dan peristiwa sosial politik yang terjadi secara aktual dengan melakukan pencarian data-data yang dapat memberikan informasi menarik dan faktual melalui proses identifikasi permasalahan yang mendetail. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (dokumentasi dan literatur) yang mendalami sumber bacaan ilmiah seperti artikel jurnal, buku, dokumen resmi, surat kabar, dan majalah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data-data yang diperoleh melalui metode ini berfungsi sebagai penguat argumen, tambahan informasi, dan justifikasi dalam pembahasan yang disampaikan peneliti terkait kepentingan nasional Hungaria dalam konteks konflik Ukraina.

PEMBAHASAN

Posisi dan Kebijakan Hungaria dalam Konflik Rusia-Ukraina

Dinamika posisi Hungaria dalam perang Rusia-Ukraina memperlihatkan pola kebijakan yang konsisten berbeda dari mayoritas negara anggota Uni Eropa dan NATO. Sejak awal invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Hungaria menempati posisi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan kolektif aliansi. Pemerintah di bawah Perdana Menteri Viktor Orbán memandang bahwa keterlibatan langsung dalam dukungan militer justru akan memperpanjang konflik dan memperburuk kondisi keamanan di Eropa (Gumilar, 2022).

Penolakan terhadap pengiriman bantuan militer dan ekonomi kepada Ukraina didasarkan pada argumentasi bahwa perang ini harus segera diakhiri melalui jalur diplomasi, bukan eskalasi persenjataan. Hungaria menghindari keterlibatan yang dapat memicu pembalasan Rusia, terlebih mengingat kedekatan historis dan ketergantungan ekonomi mereka terhadap Moskow. Di tengah langkah Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi, Hungaria menegosiasikan pengecualian khusus dalam kebijakan energi untuk tetap dapat mengimpor minyak melalui jalur pipa Druzhba.

Dalam forum NATO, Hungaria tetap mengesahkan sebagian kebijakan aliansi, namun secara tegas menolak permintaan untuk menyediakan jalur transit senjata atau mengirim bantuan militer langsung ke Ukraina. Orbán mengeluarkan kebijakan domestik yang melarang penggunaan wilayah Hungaria sebagai rute pengiriman senjata, dengan alasan melindungi keamanan nasional dan menghindari keterlibatan langsung dalam konflik. Kebijakan ini menempatkan Hungaria dalam posisi unik tetap menjadi anggota penuh NATO namun membatasi kontribusi militer pada konflik Ukraina.

Di ranah ekonomi, Hungaria juga bersikap hati-hati. Mereka menolak paket bantuan ekonomi Uni Eropa yang dirancang untuk mendukung anggaran pemerintah Ukraina, dengan argumen bahwa sumber daya finansial sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan domestik, terutama menghadapi inflasi dan kenaikan harga energi yang signifikan akibat perang. Sikap ini memicu ketegangan diplomatik dengan Brussel, namun Budapest tetap mempertahankan posisinya dengan dukungan politik domestik yang kuat.

Meski demikian, posisi ini tidak berarti Hungaria sepenuhnya menolak bantuan kemanusiaan. Pemerintah tetap mengizinkan pengiriman bantuan berupa obat-obatan, makanan, dan dukungan logistik non-militer kepada pengungsi Ukraina yang masuk melalui perbatasan. Namun, mereka menolak segala bentuk bantuan yang dapat dikategorikan sebagai dukungan militer atau pembiayaan langsung operasi perang. Sementara itu, sikap Hungaria juga dipengaruhi oleh politik identitas dan ideologi nasionalis yang dianut pemerintahan Fidesz, yang menekankan perlunya menjaga kedaulatan nasional dari intervensi luar.

Kepentingan Nasional sebagai Landasan Kebijakan

Kepentingan nasional menjadi landasan utama kebijakan Hungaria dalam menolak bantuan militer dan ekonomi kepada Ukraina. Berdasarkan kerangka Donald E. Nuechterlein, kepentingan nasional Hungaria dalam konteks ini dapat dikategorikan ke dalam empat dimensi utama: pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi. Keempatnya saling terkait dan membentuk keputusan politik luar negeri yang konsisten, meski bertentangan dengan garis kebijakan mayoritas anggota Uni Eropa dan NATO.

Dari segi pertahanan, Hungaria memandang bahwa keterlibatan militer langsung dalam konflik Rusia-Ukraina akan mengancam keamanan nasional. Geografi Hungaria yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadikannya rentan terhadap eskalasi, baik dalam bentuk ancaman militer maupun dampak pengungsi besar-besaran. Dengan menolak pengiriman senjata atau membuka jalur transit militer, pemerintah Orbán berupaya mencegah terjadinya provokasi yang dapat memicu pembalasan Rusia atau melibatkan Hungaria secara langsung di medan perang. Keputusan ini mencerminkan kalkulasi strategis untuk meminimalkan risiko keamanan langsung terhadap wilayah dan penduduk Hungaria. Pada aspek ekonomi, ketergantungan terhadap pasokan energi Rusia menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan. Hungaria mengimpor sebagian besar kebutuhan gas alam dan minyak dari Rusia melalui kontrak jangka panjang yang menawarkan harga lebih rendah dibandingkan pasaran global. Pemutusan hubungan dagang energi secara mendadak dinilai akan memicu krisis ekonomi domestik, meningkatkan inflasi, dan mengancam stabilitas pemerintahan. Proyek energi strategis seperti pengembangan PLTN Paks II bersama Rosatom juga menjadi simbol kerja sama yang sulit digantikan oleh alternatif dari negara-negara Barat (Bayer, 2017)

Kepentingan ekonomi ini diperkuat dengan situasi pasca-pandemi dan krisis energi Eropa, yang membuat pemerintah fokus pada stabilitas harga dan ketersediaan energi. Bantuan ekonomi ke Ukraina dipandang sebagai pengalihan sumber daya yang dapat memperburuk tekanan fiskal domestik. Orbán secara terbuka menyatakan bahwa prioritasnya adalah melindungi warga Hungaria dari dampak inflasi, bukan membiayai perang negara lain. Di saat negara-negara Eropa lainnya mencari alternatif pasokan energi, Hungaria justru memperkuat kontrak pembelian gas dengan harga preferensial. Dalam dimensi tatanan dunia, Hungaria menempatkan diri pada posisi yang mengedepankan diplomasi dan negosiasi dibanding konfrontasi bersenjata. Pemerintah berulang kali menyerukan gencatan senjata segera dan perundingan damai, meski seruan ini sering dianggap naif atau melemahkan upaya kolektif Uni Eropa. Bagi Budapest, menjaga hubungan baik dengan kekuatan besar seperti Rusia sekaligus mempertahankan keanggotaan di Uni Eropa dan NATO merupakan strategi untuk memaksimalkan ruang manuver diplomatik. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan bahwa stabilitas regional lebih baik dicapai melalui keseimbangan kekuatan daripada konfrontasi langsung.

Dimensi ideologi juga tidak bisa diabaikan dalam analisis kebijakan Hungaria. Pemerintahan Fidesz menganut pandangan politik konservatif dan nasionalis yang menempatkan kedaulatan negara di atas komitmen kolektif. Narasi yang dibangun menolak intervensi eksternal dalam kebijakan domestik, termasuk tekanan dari Uni Eropa terkait isu hukum dan demokrasi. Sikap ini menciptakan dasar ideologis untuk menentang kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan nasional, walaupun kebijakan tersebut diambil oleh aliansi yang diikuti. Di tingkat domestik, kebijakan ini mendapat dukungan luas dari basis pemilih konservatif yang menganggap keterlibatan militer di luar negeri bukan prioritas.

Relevansi kepentingan nasional ini terlihat dalam konsistensi kebijakan sejak awal invasi. Hungaria tidak hanya menolak bantuan militer, tetapi juga secara selektif menerima atau menolak paket sanksi terhadap Rusia. Setiap keputusan disaring berdasarkan dampaknya terhadap empat dimensi kepentingan nasional tersebut. Misalnya, ketika Uni Eropa memberlakukan embargo minyak Rusia, Hungaria hanya menyetujuinya setelah mendapatkan pengecualian khusus untuk impor melalui pipa Druzhba.

Dinamika Hubungan Bilateral dan Multilateral

Interaksi politik Hungaria dengan Rusia selama periode 2022-2024 memperlihatkan kesinambungan hubungan yang berakar dari kerja sama strategis sebelumnya. Di saat banyak negara Eropa memutuskan hubungan tingkat tinggi dengan Moskow, Budapest justru memperkuat saluran komunikasi. Pertemuan antara Viktor Orbán dan Vladimir Putin di berbagai forum internasional menunjukkan bahwa hubungan ini bersifat pragmatis dan berbasis kepentingan, terutama di sektor energi dan investasi. Dalam konteks energi, Rusia tetap menjadi pemasok dominan gas alam dan minyak bagi Hungaria, dengan kontrak jangka panjang yang dinegosiasikan sebelum perang memberikan harga yang relatif stabil di tengah lonjakan harga global. Hubungan Hungaria dengan Ukraina, sebaliknya, penuh ketegangan. Kiev memandang kebijakan Budapest sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip solidaritas Eropa (Sijati, 2025). Kritik keras sering dilontarkan oleh pejabat Ukraina, terutama terkait penolakan Hungaria terhadap bantuan militer dan sanksi energi. Isu minoritas etnis Hungaria di wilayah Transcarpathia memperkeruh hubungan, di mana pemerintah Orbán menuduh Ukraina melanggar hak-hak pendidikan dan bahasa komunitas ini, sementara Kiev menilai tuduhan tersebut dilebih-lebihkan untuk tujuan politik domestik (Agustin & Zuraya, 2023). Ketegangan ini berimplikasi pada kerja sama bilateral yang minimal, dengan saling tuding di media memperburuk persepsi publik di kedua negara.

Dengan Uni Eropa, hubungan Hungaria berjalan di atas rel kompromi yang rumit. Uni Eropa mengandalkan prinsip konsensus dalam pengambilan keputusan, yang memberi Budapest kekuatan veto de facto terhadap kebijakan tertentu. Pemerintah Orbán kerap menggunakan posisi ini untuk menegosiasikan konsesi, baik dalam bentuk pengecualian kebijakan maupun dukungan finansial. Strategi ini terlihat saat pembahasan paket bantuan ekonomi besar untuk Ukraina, di mana Hungaria menunda persetujuan hingga memperoleh jaminan pendanaan tambahan dari Brussel. Namun, strategi ini juga membawa konsekuensi berupa kritik karena dianggap melemahkan kesatuan politik Eropa di tengah krisis.

Dalam forum NATO, posisi Hungaria relatif stabil karena organisasi ini berfokus pada pertahanan kolektif. Meski menolak keterlibatan langsung dalam pengiriman senjata ke Ukraina, Hungaria tetap memenuhi kewajiban lain sebagai anggota, seperti kontribusi pasukan untuk misi NATO di luar kawasan dan partisipasi dalam latihan militer bersama. Kebijakan ini

memungkinkan Budapest mempertahankan kredibilitasnya di aliansi sambil tetap menghindari langkah-langkah yang berpotensi memicu konfrontasi dengan Rusia.

Kerangka teori neorealisme menjelaskan bahwa perilaku Hungaria merupakan bentuk adaptasi negara dalam sistem internasional yang bersifat anarki. Sebagai aktor rasional, Hungaria berupaya meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan relatif. Dalam hal ini, keuntungan relatif diperoleh dari tetap menjaga pasokan energi murah, menghindari risiko militer langsung, dan mempertahankan stabilitas domestik. Sistem internasional yang anarki mendorong negara untuk mengadopsi strategi *self-help*, yang dalam kasus Hungaria diwujudkan dengan kebijakan luar negeri yang independen dari tekanan mayoritas anggota aliansi.

Konsep aliansi internasional juga relevan untuk memahami posisi Hungaria. Keanggotaannya dalam NATO dan Uni Eropa memberikan keuntungan keamanan kolektif dan akses ekonomi, tetapi juga menciptakan kewajiban yang kadang bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam teori aliansi, perilaku Hungaria dapat dikategorikan sebagai *soft balancing* tetap berada dalam aliansi, namun mengurangi dukungan terhadap kebijakan tertentu untuk melindungi kepentingan sendiri. Fenomena ini menimbulkan perdebatan internal di Uni Eropa dan NATO. Sebagian negara anggota menganggap bahwa perilaku Hungaria melemahkan kesatuan aliansi, sementara pihak lain melihatnya sebagai cerminan keragaman kepentingan nasional di antara anggota. Hungaria memanfaatkan mekanisme pengambilan keputusan yang membutuhkan konsensus untuk menegosiasikan posisi yang lebih menguntungkan. Strategi ini terbukti efektif dalam beberapa kasus, seperti mendapatkan pengecualian energi dan bantuan keuangan tambahan dari Uni Eropa.

Dari perspektif hubungan internasional, sikap Hungaria menunjukkan bahwa keanggotaan dalam aliansi tidak menghapus otonomi kebijakan luar negeri. Justru, posisi dalam aliansi dapat digunakan sebagai alat tawar untuk memaksimalkan keuntungan nasional. Dalam kasus perang Rusia-Ukraina, Hungaria menggunakan posisinya untuk menjaga hubungan strategis dengan Rusia sambil tetap mendapatkan manfaat dari keanggotaannya di Barat. Interaksi politik ini mencerminkan strategi *hedging*, yaitu menjaga hubungan baik dengan dua kubu yang berseberangan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Strategi *dual alignment* Hungaria membawa dampak yang bersifat ganda. Dalam jangka pendek, kebijakan ini berhasil mempertahankan stabilitas pasokan energi dan relatif minimnya dampak perang terhadap kehidupan sehari-hari warga Hungaria. Inflasi memang meningkat, tetapi tidak sedrastis di negara-negara Eropa yang memutuskan hubungan energi dengan Rusia. Di sisi politik, Viktor Orbán dan partainya mampu mempertahankan dukungan elektoral dengan mengemas kebijakan luar negeri sebagai wujud perlindungan kepentingan nasional.

Namun, implikasi jangka panjang berpotensi lebih kompleks. Jika konflik Rusia-Ukraina berlanjut dan tekanan Barat terhadap Moskow semakin besar, Hungaria akan menghadapi dilema antara mempertahankan hubungan dengan Rusia atau menyesuaikan diri dengan kebijakan kolektif aliansi. Potensi sanksi politik atau pengurangan dukungan finansial dari Uni Eropa juga tidak bisa diabaikan, terutama jika negara-negara anggota lain memandang perilaku Budapest sebagai ancaman bagi solidaritas.

Posisi Hungaria juga dapat memengaruhi dinamika internal NATO dan Uni Eropa. Meski tidak secara langsung menghambat operasi militer aliansi, kebijakan pembatasan bantuan ke Ukraina bisa menciptakan preseden bagi negara anggota lain untuk mengambil sikap serupa dalam krisis di masa depan. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas NATO

sebagai organisasi pertahanan kolektif dan Uni Eropa sebagai aktor politik global. Pengaruh kebijakan Hungaria juga terasa dalam hubungan bilateral di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Beberapa negara menunjukkan minat pada pendekatan yang lebih pragmatis terhadap Rusia, meski tidak sampai meniru sepenuhnya kebijakan Budapest. Sebaliknya, negara-negara seperti Polandia dan negara Baltik memperkuat posisi keras terhadap Rusia dan menganggap sikap Hungaria sebagai hambatan strategis. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa Uni Eropa dan NATO bukanlah blok yang sepenuhnya homogen, melainkan koalisi negara dengan kepentingan yang berbeda.

Kebijakan Hungaria yang menolak bantuan militer dan ekonomi kepada Ukraina merupakan manifestasi dari kalkulasi kepentingan nasional yang rasional dalam sistem internasional yang anarki. Keputusan ini dibentuk oleh perpaduan faktor struktural ketergantungan energi, posisi geografis, dan dinamika aliansi serta faktor domestik berupa ideologi nasionalis dan dukungan elektoral. Strategi *dual alignment* memungkinkan Budapest memperoleh keuntungan ekonomi dari Rusia sambil mempertahankan manfaat keamanan dan akses pasar dari keanggotaannya di Barat. Analisis melalui kerangka neorealisme menunjukkan bahwa perilaku Hungaria mencerminkan upaya negara kecil hingga menengah untuk menghindari *entrapment* dan *abandonment* dalam dinamika aliansi. Keberhasilan strategi hedging ini bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola hubungan eksternal dan memanfaatkan celah dalam dinamika politik internasional. Temuan ini menegaskan bahwa dalam sistem internasional yang anarki, loyalitas terhadap aliansi bersifat kondisional dan bergantung pada kesesuaian dengan kepentingan nasional. Dalam konteks perang Rusia-Ukraina, kebijakan Hungaria menjadi studi kasus yang memperlihatkan bahwa solidaritas internasional selalu diuji ketika berhadapan dengan kalkulasi keuntungan dan kerugian domestik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan Hungaria dalam menolak bantuan militer dan ekonomi Uni Eropa kepada Ukraina merupakan hasil dari kalkulasi kepentingan nasional yang bersifat rasional dalam sistem internasional yang anarki. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh empat dimensi utama kepentingan nasional menurut Nuechterlein pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi yang saling berinteraksi.

Faktor struktural seperti ketergantungan energi terhadap Rusia, posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Ukraina, dan keterikatan dalam aliansi NATO - Uni Eropa membentuk dilema keamanan yang mendorong strategi *dual alignment* dan hedging. Strategi ini memungkinkan Hungaria memaksimalkan manfaat dari kedua pihak yang berseberangan sambil meminimalkan risiko langsung terhadap keamanan dan stabilitas domestik. Di tingkat domestik, ideologi nasionalis dan dukungan elektoral menjadi penguat kebijakan ini, sementara di tingkat internasional, mekanisme konsensus dalam Uni Eropa dan NATO dimanfaatkan sebagai alat tawar. Kebijakan Hungaria dalam kasus ini menegaskan bahwa loyalitas terhadap aliansi bersifat kondisional, bergantung pada kesesuaian dengan kepentingan nasional, dan menunjukkan bahwa solidaritas internasional dapat teruji ketika berhadapan dengan prioritas domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D., & Zuraya, N. (2023, September 26). Hungaria Tarik Dukungan Terhadap Ukraina. *Republika*. <https://internasional.republika.co.id/berita/s1kmk0383/hungaria-tarik-dukungan-terhadap-ukraina>
- Bayer, L. (2017, February 1). Why Putin needs Orbán. *Politico.Eu*. <https://www.politico.eu/article/why-vladimir-putin-needs-viktor-orban-russia-hungary/>
- Burhan Hakim, A., & Moh. Sadiyin. (2022). Pengaruh Perang Rusia – Ukraina Terhadap Stabilitas Hubungan Politik Indonesia dan Rusia. *Journal of International Relations (JoS)*, 2(1).
- CNBC Indonesia. (2022, June 3). Tok! Uni Eropa Resmi Jatuhkan Paket Sanksi Keenam untuk Rusia . *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220603183607-4-344259/tok-uni-eropa-resmi-jatuhkan-paket-sanksi-keenam-untuk-rusia>
- Gumilar, T. (2022, March 8). NATO Terbelah, Hungaria Tolak Kirim Bantuan Militer ke Ukraina. *Insight Kontan*. <https://insight.kontan.co.id/news/nato-terbelah-hungaria-tolak-kirim-bantuan-militer-ke-ukraina>
- Khaira Riswan, K. (2024, June 7). Hongaria tolak pengiriman pasukan ke Ukraina jika NATO ikut campur. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/4141410/hongaria-tolak-pengiriman-pasukan-ke-ukraina-jika-nato-ikut-campur>,
- Sijati, S. S. (2025, May 10). Ukraina-Hungaria Saling Usir Diplomat di Tengah Skandal Mata-mata. *IdnTimes*. <https://www.idntimes.com/news/world/ukraina-hungaria-saling-usir-diplomat-di-tengah-skandal-mata-mata-01-nz139-ykr38s>